Implementasi Manajemen Pembiayaan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo

Muhlil Musolin, Khoirun Nisa', Laelatul Mudmiroh

Sekolah Tinggi Agama Islam An Nawawi Purworejo

mmuhlil@gmail.com, irunicer@gmail.com, lailatulmudmiroh03@gmail.com

Abstract: Education funding is one of the central systems in education, financing is part of the support of the implementation of education because it involves the operational financing of education implementation from the smallest to the largest operational funding. This research discusses the implementation of financing management in An Nawawi 01 Berjan Purworejo MTs. This study uses a qualitative descriptive approach and data collection techniques used are observation, interviews with employees of the treasurer of the madrasa and documentation related to financial records at An-Nawawi 01 MTs Berjan Purworejo. Data creatiability test is done by using triangulation, data dependability test, transferability test and confirmability test. Data analysis techniques using qualitative descriptive analysis techniques with stages of data collection, data reduction, data presentation, to drawing conclusions. The results showed that the implementation of financial management in MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo began with financial planning (budgeting) through the process of financial budgeting that was carried out in accordance with stages systematically. Execution / accounting (accounting) with accounting books is general cash books, invoices, cash assistance books, salary receipt books, bank supporting books and financial statements. The financial supervision process begins by making the RAPBM the standard for overseeing the implementation of supervision both internal and external.

Keywords: Implementation, Financing Management

Abstrak: Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem yang sentral dalam pendidikan, pembiayaan adalah bagian dari pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai pembiayaan operasional yang terbesar. Penelitian ini membahas implementasi manajemen pembiayaan di MTs An Nawawi 01 Berjan Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan pegawai bagian bendahara madrasah serta dokumentasi terkait dengan pencatatan keuangan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo. Uji kreadibilitas data yang dilakukan dengan

menggunakan triangulasi, uji dependabilitas data, uji transferabilitas dan juga uji konfirmasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi manajemen pembiayaan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dimulai dengan perencanaan keuangan (budgeting) melalui proses penganggaran keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan tahapan secara sistematis. Pelaksanaan/pembukuan (akunting) dengan pembukuan akuntansi adalah buku kas umum, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank dan laporan keuangan. Proses pengawasan keuangan dimulai dengan menjadikan RAPBM sebagai standar pengawasan pelaksanaan pengawasan baik pihak internal dan pihak eksternal.

Kata Kunci : Implementasi, Manajemen Pembiayaan

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu, seperti halnya tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”¹ Pendidikan adalah unsur utama dalam pengembangan sumber daya manusia, karena manusia sadar atau tidak sadar selalu mengalami proses pendidikan setiap harinya. Sejak kecil hingga dewasa manusia melakukan proses pendidikan baik formal maupun non formal. SDM dianggap bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan serta keahliannya sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang.²

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia, tidak sekedar hak moral melainkan juga menjadi hak

¹ UU RI NO 20, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia,” Zitteliana, 2003.

² Ryan Indy, Fonny J. Waani, dan N. Kandowanko, “Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara,” *Holistik, Journal Of Social and Culture* 12, no. 4 (2019): p. 1-21.

konstitusional.³ Dengan adanya pendidikan manusia menjadi lebih bermoral dan mengetahui apa yang belum pernah diketahuinya dan mengerti baik buruk segala sesuatunya. Pendidikan sebenarnya adalah hak bagi semua manusia, tidak memandang apakah orang miskin atau kaya karena kesempatan memperoleh pendidikan yang layak adalah hak semua manusia. Akan tetapi dalam kenyataannya, di Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang krusial yang harus segera dibenahi baik oleh pemerintah, pengelola madrasah dan masyarakat agar mutu pendidikan di Indonesia mampu menjawab amanah yang ada didalam undang-undang.⁴

Dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, pendidikan memiliki acuan agar tercapainya pendidikan yang diharapkan. Acuan ini digunakan sebagai standar pada lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan yang berkualitas tercapai. Adapun standar tersebut adalah: a). Standar Kelulusan b). Standar isi c). Standar pengelolaan pendidikan d). Standar Pembiayaan pendidikan e). Standar penilaian pendidikan f). Standar proses g). Standar pendidik dan tenaga kependidikan h). Standar sarana dan prasarana.⁵

Pemerintah memiliki delapan standar untuk mencapai pendidikan yang berkualitas salah satunya yaitu standar pembiayaan. Dalam tujuan pendidikan, standar pembiayaan memiliki peran yang sangat penting sehingga perlu di kelola dengan baik atau dimanajemen. Manajemen adalah suatu disiplin ilmu yang secara singkat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan.⁶ Tata kelola keuangan selanjutnya disebut sebagai manajemen pembiayaan/ keuangan. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar hanya karena masalah keuangan baik untuk menggaji guru, mengadakan

³ Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): p. 158-82.

⁴ Inanna Inanna, "Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral," *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1, no. 1 (2018): p. 27.

⁵ Asfila, Murniati, dan Nasir Usman, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Mtsn Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah," *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah* 3, no. 4 (2015): p. 123-29.

⁶ Masditou, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu," *ANSIRU PAI* 1, no. 2 (2017): p. 1-10.

sarana prasarana pembelajaran namun Pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.⁷

Standar pembiayaan sebagai salah satu standar nasional pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (PP RI SNP). Pada bab IX pasal 62 dari PP disebutkan bahwa Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Maka agar penyelenggaraan dimadrasah dapat berjalan dengan baik harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan madrasah dalam menyediakan dana di khawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan untuk itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pembiayaan pendidikan agar terselenggara dengan baik. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.⁸

Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan yaitu komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran.⁹ Keuangan/ pembiayaan di madrasah selayaknya dikelola secara efektif agar bisa diatur, direncanakan dan dipergunakan secara baik dan sesuai sasaran kebutuhan serta dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.¹⁰ Pengelolaan terhadap pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya sistem manajemen yang baik, dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus berkaitan dengan suatu manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di madrasah¹¹, dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya.

Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan sekolah harus sesuai dengan prinsip-prinsip di atas. Mulai dari tahap perencanaan, penggunaan biaya pendidikan, pengawasan serta

⁷ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, p. 193.

⁸ Jamiludin Usman, "Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2016): p. 219,

⁹ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, p. 47.

¹⁰ Mulyasa, p. 49.

¹¹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), p. 1

pertanggungjawaban atas penggunaan biaya pendidikan agar dapat membantu mengurangi permasalahan pembiayaan pendidikan yang sering terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang implementasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembiayaan di lembaga pendidikan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹² Kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹³ Semua data dan informasi baik berupa data primer maupun data sekunder diwujudkan dalam bentuk deskriptif.

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses sistematis manajemen pembiayaan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo yang terdiri dari proses penganggaran, pencatatan keuangan dan proses pertanggungjawaban keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang bersumber dari pegawai bagian bendahara madrasah. Observasi terkait dengan manajemen pembiayaan dan dokumentasi terkait dengan pencatatan keuangan di Mts An-Nawawi Berjan Purworejo. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi, uji dependabilitas data, uji transferabilitas dan juga uji konfirmasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, hingga pada tahap penarikan kesimpulan.

¹² Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Pembiayaan

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.¹⁴ Biaya (*cost*) dapat diartikan pengeluaran yang dalam istilah ekonomi biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya.

Manajemen pembiayaan adalah suatu proses kegiatan yang mengatur keuangan dengan menggerakkan orang lain dan segala aktifitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan serta pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.¹⁵

Tujuan utama penerapan manajemen sekolah pada intinya adalah untuk penyeimbangan struktur kewenangan antara sekolah, pemerintah daerah pelaksanaan proses dan pusat sehingga manajemen menjadi lebih efisien.¹⁶

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses memaksimalkan sumberdaya manusia dalam mengatur keuangan lembaga pendidikan dari sumber pendapatan, penggunaan, pencatatan dan pelaporan.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.¹⁷

Menurut Nanang Fattah "biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*)". Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa. Sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan

¹⁴ Anton Athoilah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), p. 14.

¹⁵ Sri Mirnati, *Manajemen Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), p. 212.

¹⁶ Adi Wibowo, "Study Komparasi Penyelenggaraan Pendidikan Smk(Studi Kasus Smk Di Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah Dan di SMK PGRI 2 Kediri)," *Jurnal At-Tarbiyat : Jurnal Pendidikan Islam*, no. 1 (2018): p. 1-22,

¹⁷ Bidayatun Ni'mah, *Skripsi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan* (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).

oleh siswa selama belajar.¹⁸ Sehingga dapat diperinci biaya langsung pendidikan adalah biaya penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh sekolah dan siswa. Biaya langsung lebih mudah dihitung karena diketahui oleh wajib pajak dan data sekolah pun tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit dihitung. Biaya langsung terwujud dalam bentuk penyelenggaraan PMB, gaji guru dan pegawai, buku perlengkapan dan biaya perawatan pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan keluarga untuk keperluan sekolah seperti: ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan serta biaya belajar tambahan karena itu kenapa disebut biaya tidak langsung.

3. Prinsip- Prinsip Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan madrasah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.¹⁹

Berikut pembahasan masing-masing prinsip tersebut, yaitu:

- a. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Dalam lembaga pendidikan perlu adanya keterbukaan dalam manajemen keuangannya yang berarti keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggung jawabannya juga harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan terhadap orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa adalah Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Madrasah (RAPBM) bisa ditempel dipapan pengumuman ruang guru atau tata usaha sehingga siapa saja yang membutuhkan akan mudah mengetahuinya. Orang tua siswa juga bisa mengetahui sejumlah uang dana penggunaannya yang diterima sekolah dari orang tua siswa. Perolehan informasi ini bisa menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap madrasah.
- b. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang madrasah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah

¹⁸ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Rosdakrya, 2000), p. 23.

¹⁹ UU RI NO 20, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia."

ditetapkan serta peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah harus membelanjakan uang sesuai peruntukannya.

- c. Efektifitas, diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manajemen keuangan dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga.
- d. Efisiensi yaitu berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan, manajemen keuangan dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang sudah ditetapkan.²⁰

4. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan madrasah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah. Seperti halnya madrasah negeri ataupun swasta memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat serta orang tua siswa. Menurut UU No 20 tahun 2003 pasal 47 Tentang Sumber Pendanaan Pendidikan yaitu; Ayat (1) sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Ayat (2) pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ayat (3) ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.²¹

Selanjutnya menurut Sulistyorini sebagaimana dikutip Sonedi dkk bahwa sumber pembiayaan atau sumber keuangan sekolah/madrasah secara garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga sumber yaitu :

- a. Pemerintah, baik pusat atau daerah yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukan bagi kepentingan pendidikan.
- b. Orang tua Peserta didik.
- c. Masyarakat, baik mengikat atau tidak.²²

Pendapat lain mengatakan sumber-sumber keuangan pendidikan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat

Sumber dana dari pemerintah pusat adalah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan juga Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Dengan tujuan

²⁰ Nur Komariah, "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan," *Al-Afkar* 6, no. 1 (2018): p. 67-94.

²¹ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 2007), p. 163.

²² Sonedi Sonedi, Zulfa Jamalie, dan Majeri Majeri, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat," *Fenomena* 9, no. 1 (2017): p. 25.

memberdayakan daerah, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan dalam model *black grant* yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

b. Pembiayaan pendidikan dari orang tua

Biaya pendidikan yang berasal dari orang tua antara lain: Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP), Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (SBP3) dan sumbangan yang bersifat incidental (biaya praktikum, ketrampilan, kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain).

c. Sumbangan dari pihak lain

Sumbangan pihak lain yaitu sumbangan dari masyarakat selain warga sekolah dan juga sumbangan dari orang tua siswa yang tidak terikat dengan kewajiban pembayaran dana tersebut bisa berupa pinjaman (loan) dan hibah (grant).²³

5. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan bukanlah hal yang mudah dilaksanakan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan atau pembiayaan. Oleh karena itu peranan sumber daya manusia sangat esensial dalam menjalankan suatu organisasi karena manusia adalah kunci dari semua persoalan.²⁴ Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengaturnya, pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau madrasah dikelola oleh manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas untuk mengatur jalannya keuangan, dalam menjalankan tugasnya manajer harus memiliki langkah-langkah yang tepat agar apa yang dikerjakan bisa memberikan kelancaran untuk lembaga pendidikan tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain adanya perencanaan, adanya SDM yang jujur, loyal dan berkualitas serta adanya manajer keuangan yang terbuka, tegas dan transparan dalam setiap tugasnya.

Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, ketiga tahapan tersebut jika diterapkan dalam manajemen keuangan akan menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), tahap pelaksanaan/pembukuan (akunting) dan yang terakhir tahap penilaian (auditing).²⁵

a. Perencanaan pembiayaan pendidikan (Budgeting)

Penyusunan anggaran sangat penting dalam bidang pendidikan karena anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk

²³ Martin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), p. 18.

²⁴ Ita Nurmalasari dan Dewi Zainul Karimah, "Peran Manajemen Sdm Dalam Lembaga" 2, no. 1 (2020): p. 33-44.

²⁵ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 257.

angka-angka uang yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan anggaran merupakan negoisasi atau kesepakatan antara puncak pemimpin dengan pemimpin dibawahnya dalam menentukan besarnya biaya alokasi suatu penganggaran.

Mulyasa menjelaskan bahwa perencanaan pembiayaan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah /Madrasah (RAPBS/M).²⁶ Penyusunan anggaran merupakan gambaran kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Fungsi dan manfaat anggaran dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran.
- 2) Sebagai alat kewenangan yaitu memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana.
- 3) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan sehingga dapat diketahui apabila adanya pemborosan atau penghematan anggaran.²⁷

Prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode penganggaran seperti;
 - a) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
 - b) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakan finansial.
 - c) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang sudah disetujui oleh instansi.
 - d) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan yang berwewenang.
 - e) Melakukan revisi anggaran.
 - f) Persetujuan revisi anggaran.
 - g) pengesahan anggaran.
 - 2) Pengembangan rencana anggaran belanja madrasah (RAPBM).²⁸
- b. Akuntansi (accounting)

Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan secara efisien dan efektif untuk mengevaluasi kegiatan dalam sebuah

²⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), p. 21.

²⁷ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), p. 52.

²⁸ Fattah, p. 54.

lembaga/organisasi. Akuntansi diperlukan dalam manajemen keuangan untuk:

- 1) Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan;
- 2) Pertanggungjawaban organisasi kepada investor, pemerintah dan sebagainya.

Kepala sekolah menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam tujuan pendidikan. Keputusan yang di ambil kepala sekolah berdasarkan informasi akuntansi adalah untuk menentukan apa saja yang madrasah akan beli, berapa persediaan ATK yang dibutuhkan dan lain-lain.

c. Evaluasi (Controlling)

Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan aliran anggaran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan bendahara. Hal ini dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan menggunakan berita acara, kepala sekolah sebagai atasan yang bertanggung jawab penuh atas pengendalian sedangkan pengawasan dari pihak berwenang dilakukan oleh instansi vertikal seperti Dinas Pendidikan dan BAWASDA. Evaluasi adalah tahap terakhir setelah tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan kemudian evaluasi.

Evaluasi adalah proses pembuatan pertimbangan yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, menjamin cara kerja yang efektif dan efisien, untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan dan penyimpangan dalam suatu kegiatan.

Implementasi Manajemen Pembiayaan di MTs An-Nawawi

MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo adalah sebuah madrasah yang berada di kota Purworejo. MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren di Purworejo yaitu Yayasan Roudlotut Thullab yang sekarang lebih dikenal sebagai Yayasan Pondok Pesantren An-Nawawi. MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo berdiri pada tahun 1995 yang status awalnya masih terdaftar SK kanwil Depag kemudian tahun 2000 Madrasah berubah status menjadi diakui dengan nomor SK kanwil Depag No Wk/5.a/PP.00.5/840/2000. Setelah itu pada tahun pelajaran 2005/2006 MTS An-Nawawi 01 Berjan Purworejo melakukan Akreditasi sekolah yang memperoleh Piagam Terakreditasi B. Dalam melaksanakan operasional

pertama kalinya MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo sudah dapat menerima dua lokal kelas yaitu 1A dan 1B dengan jumlah anak 86 siswa dan untuk tahun berikutnya setiap kelas baru memperoleh 2 kelas. Pada tahun 1998/1999 MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo berhasil meluluskan 100% dengan nilai EBTANAS murni tertinggi 38,67 dengan rata-rata 32,71 kemudian tahun-tahun selanjutnya siswa di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo semakin bertambah dan untuk tahun ini MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo juga sudah terakreditasi A dengan jumlah murid 1060 dan guru serta karyawan sekitar 61 orang.²⁹

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan

Setiap kegiatan manajemen selalu di dahului dengan proses perencanaan, begitu juga kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan di MTs An-nawawi 01 Berjan Purworejo yang dimulai dengan kegiatan perencanaan keuangan. Proses perencanaan keuangan dilakukan secara sistematis. Dalam penganggaran di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dimulai dengan mengadakan (1) rapat pleno madrasah (2) mengidentifikasi pedapatan dana madrasah (3) mengidentifikasi rencana pengeluaran madrasah (4) menyusun RAPBM (5) melakukan revisi RAPBM (6) tahap pengesahan RAPBM.

Sebelum tahun ajaran baru dimulai MTs An-nawawi 01 Berjan Purworejo mengadakan rapat madrasah terkait dengan pembahasan RAPBM. Pada tahun ajaran 2019/2020 rapat diselenggarakan pada awal Agustus 2019 rapat ini dihadiri oleh Kepala Sekolah, Kepala TU, Bendahara Madrasah Dan Waka Sekolah. Rapat yang diselenggarakan setiap setahun sekali ini membahas tentang pembiayaan madrasah diantaranya pembahasan terkait apa saja biaya yang akan digunakan untuk keperluan madrasah serta penyusunan RAPBM. Dalam rapat ini juga membahas tentang rencana pengembangan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan kedepannya.³⁰

2. Sumber-sumber keuangan MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo

Sumber keuangan MTs An Nawawi 01 Berjan Purworejo terdapat tiga sumber yang pertama yaitu, sumber keuangan yang berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang kedua sumber keuangan yang berasal dari BANSEK (Bantuan Sekolah), yang mana dana BOS dan BANSEK diberikan oleh pemerintah kepada pihak sekolah untuk menunjang kemajuan dan kemakmuran sekolah. yang ketiga, yaitu sumber keuangan dari Komite madrasah yang berupa SPP.³¹

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad, SHI., MSI. Waka Kurikulum pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 09.10 WIB.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq Fauzi, SHI. Kepala MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 11.47 WIB.

³¹ Wawancara dengan Bendahara MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 10.25 WIB.

3. Proses pencairan keuangan

Proses pencairan dana BOS, dana BOS didapatkan dari pemerintah yaitu kemenag. Sebelum pemerintah memberikan bantuan kepada setiap sekolah, pemerintah terlebih dulu meminta data lengkap setiap siswa supaya dari pihak pemerintah mengetahui jumlah siswa yang ada. Setelah sekolah menyetorkan data siswa, baru pemerintah menurunkan surat keputusan (SK) pemberitahuan mengenai pencairan dana BOS melalui Bank Jateng. Untuk proses pengambilan dana BOS harus didampingi oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah, dan dari pemerintah ada program pemberian dana BOS, yaitu dengan program Triwulan atau tiga bulan sekali.

Untuk proses pencairan dana BANSEK, dana BANSEK didapatkan dari pemerintah yaitu Bupati. Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp.150.000 persiswa, untuk mencairkan dana tersebut dari pihak sekolah harus membuat proposal data mengenai kebutuhan sekolah yang akan dibeli.³²

4. Proses Pengelolaan dan Penggunaan Keuangan

Dari beberapa sumber keuangan yang ada, adapun pembagian kegunaan sumber keuangan tersebut, yaitu :

a. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Dana BOS yang sudah masuk ke sekolah diberikan kepada setiap siswa sebagai penunjang belajar mereka, setiap siswa mendapat Rp. 1.000.000, tetapi dari pihak pemerintah memberikannya tidak langsung kepada siswa tersebut, namun ada program triwulan, maksudnya dari pihak pemerintah memberikan dana BOS setiap 3 bulan sekali yang diberikan melalui sekolah.

Pengelolaan dana BOS dari pihak sekolah uang tidak diberikan kepada siswa secara langsung, melainkan uang tersebut dikelola oleh pihak sekolah untuk pembiayaan keperluan sekolah mereka. Karena dikhawatirkan adanya salah penggunaan apabila dana BOS diberikan langsung kepada siswa. Pengelolaan dana BOS yang ada di Madrasah Tsanawiyah An Nawawi ini juga digunakan untuk keperluan sekolah lainnya, seperti halnya pemberian HR guru dan karyawan, pembelian barang-barang pelengkap sekolah, namun dalam penggunaan dana BOS tidak diperbolehkan untuk pembangunan gedung, maksudnya dana BOS hanya boleh digunakan untuk merenovasi bukan membangun dari awal.³³

b. Dana BANSEK (Bantuan Sekolah)

³² Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.32 WIB.

³³ Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 11.15 WIB.

Dana BANSEK (Bantuan Sekolah) diberikan oleh pemerintah kepada sekolah untuk membantu kemajuan sekolah dan melengkapi fasilitas-fasilitas yang kurang lengkap dari sekolah tersebut yang sekiranya tidak bisa dibeli dengan dana BOS. Dana BANSEK diberikan kepada sekolah juga ada ketentuan-ketentuan dalam penggunaannya, Seperti dari sekolah tersebut dibutuhkan computer atau mesin foto copy, maka dana BANSEK dipergunakan untuk membeli computer atau mesin foto copy. Dana BANSEK keluar dari pemerintah untuk sekolah sebesar Rp. 150.000 per siswa dalam setahun.

Untuk pengajuan dana BANSEK (Bantuan Sekolah) diperlukan adanya pengajuan proposal untuk memperlancar keluarnya dana BANSEK dan memperjelas kebutuhan yang diperlukan. Dalam penggunaan dana BANSEK harus disertai dengan data barang yang lengkap beserta foto dan kwitansi pembelian dari barang-barang yang telah dibeli untuk dibukukan menjadi laporan atau arsip, setelah pembukuan laporan selesai, laporan tersebut diserahkan kepada pemerintah selang 1 bulan kemudian pemerintah datang ke sekolah untuk mengecek bukti atas laporan yang telah dibuat oleh pihak sekolah apakah data sesuai dengan fakta yang ada.³⁴

c. Dana Komite (SPP)

Dana komite yaitu berupa SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), dana dari komite sebesar Rp. 75.000 per bulan dengan jumlah siswa sebanyak 1060 anak. Madrasah tsanawiyah An Nawawi masih di bawah naungan yayasan, maka dalam pemasukan dana komite yang berupa SPP tersebut harus dibagi dengan yayasan, 20% untuk yayasan dan 80% untuk madrasah. Dana dari komite dapat digunakan untuk beberapa hal, seperti melengkapi kekurangan-kekurangan peralatan sekolah yang sekiranya tidak bisa dibeli dengan dana BOS dan BANSEK, kegiatan-kegiatan sekolah seperti OSIS dan pramuka atau adanya takziyah dan menjenguk orang sakit, HR guru juga diambil dari dana komite 31%, dikarenakan MTs An Nawawi masih swasta jadi pengambilan dana untuk HR guru dari berbagai pemasukan sekolah, dan lain-lain.³⁵

Setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan keuangan Madrasah baik itu transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran selalu dilakukan pembukuan untuk menghindari terjadinya salah tulis atau salah paham di kemudian hari karena bendahara lupa mencatat transaksi yang telah terjadi. Bentuk bentuk pembukuan atau pencatatan

³⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq Fauzi, SHI. Kepala MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 11.46 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 11.05 WIB.

keuangan yang digunakan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo meliputi buku kas umum, buku bantuan bank, buku kas tunai, buku harian dan faktur dan juga buku tabungan serta buku penerimaan gaji. Format buku kas umum yang digunakan oleh MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo memuat tanggal, nomor kode, nomor bukti, uraian penerimaan pengeluaran dan saldo. Fungsi buku kas umum untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap hari, selain itu juga memuat saldo setiap akhir bulan nya. Buku kas umum ini dicatat dan dilaporkan setiap bulannya kepada kepala madrasah. Melalui buku kas umum ini kepala madrasah dapat mengetahui berapa penerimaan dan pengeluaran madrasah.³⁶

Buku pembantu kas di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo yaitu untuk membantu pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Sama halnya dengan buku kas umum tapi dalam buku pembantu kas ini lebih berfungsi untuk membantu mencatat sebelum dipindahkan ke buku kas umum. Dalam buku pembantu kas terdapat kolom debit untuk saldo penerimaan dan kolom kredit untuk pengeluaran buku pembantu kas ini biasanya digunakan pada saat dana BOS belum diterima oleh Madrasah.

Buku penerimaan gaji di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dibuat untuk mencatat gaji para guru dan karyawan yang telah dibayarkan. Gaji para guru dan karyawan ini diberikan setiap 1 bulan sekali. Setiap guru dan karyawan menerima gaji sesuai dengan beban jam kerja yang dibebankan kepada guru dan karyawan tersebut. Untuk penggajian guru MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo bekerja sama dengan yayasan BMT An Nawawi dan itu akan dimulai pada bulan ini penggajian guru dapat diambil melalui BMT An Nawawi.

Buku pembantu bank di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dibuat untuk memudahkan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penggunaan jasa bank. Pembukuan rekening bank sangat diperlukan karena melalui rekening milik Madrasah dana BOS dapat dicairkan. Buku pembantu bank ini dibuat setiap 1bulan sekali sebagai laporan. Format buku pembantu bank yang digunakan adalah tanggal, uraian, penerimaan, pengeluaran dan jumlah.³⁷

Laporan keuangan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dibuat setiap bulan. Laporan keuangan ini dibuat dengan format nomor tanggal dan nama transaksi debit kredit dan saldo. Laporan keuangan ini akan dilaporkan setiap bulannya kepada kepala madrasah untuk memudahkan kepala madrasah dalam mengontrol keuangan Madrasah

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad, SHL., MSI. Waka Kurikulum pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 11.45 WIB.

³⁷ Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 10.37 WIB.

mengenai penerimaan dan pengeluaran Madrasah setiap bulannya. Dokumen lain yang digunakan dalam pencatatan keuangan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo yaitu faktur. Yang dimaksud faktur adalah pencatatan keuangan berupa nota kontan kuitansi ataupun bukti pembayaran dan bukti pembelian yang sah sebagai bukti transaksi. Proses pencatatan keuangan pendidikan merupakan langkah penting yang dilakukan untuk melaksanakan transparansi keuangan pendidikan. Beberapa catatan keuangan yang digunakan MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dalam proses pencatatan keuangan di antaranya buku kas umum dan buku pembantu kas, faktur, buku pembantu bank, buku penerimaan gaji dan laporan keuangan.³⁸

Pembukuan yang dilakukan MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo menggunakan berbagai pembukuan dengan fungsi akuntansi yang berbeda pada setiap regunya akan tetapi jika dikaitkan dengan pendapat Nanang Fattah dalam buku konsep manajemen MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo tidak melakukan pembukuan seperti buku kas piutang dan buku pos. Dan juga terdapat beberapa pembukuan yang dilakukan MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo akan tetapi tidak terdapat pada pendapat Nanang Fattah seperti MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo tidak menggunakan buku BOS karena penggunaannya dirasa kurang efektif dikarenakan bendahara diharuskan melakukan pencatatan di 2 pembukuan yaitu buku pos dan buku kas umum. Setiap pembukuan akuntansi dalam pencatatan keuangan memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing. Sehingga dalam proses pencatatan keuangan pembukuan akuntansi yang digunakan seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah, pembukuan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah nantinya akan membuat proses pencatatan keuangan menjadi efektif dan efisien. Melalui pencatatan keuangan ini Madrasah mampu melaksanakan dan menjaga akuntabilitas keuangan madrasah, maksudnya adalah uang yang telah dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti orang tua siswa maupun pemerintah.³⁹

5. Pengawasan keuangan

Pengawasan keuangan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo yang berfungsi sebagai kontrol atas perencanaan dan pelaksanaan keuangan madrasah. Pengawasan perlu dilakukan sebagai bentuk wujud transparansi keuangan madrasah, melalui pengawasan

³⁸ Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.40 WIB.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq Fauzi, SHI. Kepala MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 09.10 WIB.

keuangan ini pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah dan orangtua siswa mengetahui kondisi keuangan di MTS An-Nawawi 01 Berjan Purworejo. Pengawasan keuangan ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran keuangan dengan cara melakukan pemeriksaan antara pelaksanaan dengan perencanaan keuangan. Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal maksudnya pengawasan secara internal yaitu dilakukan oleh kepala sekolah setiap sebulan sekali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh bendahara. Sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan setiap sekolah sudah menerima uang dan membuat laporan tentang penggunaan keuangan tersebut yaitu setiap 3 bulan sekali.

Pengawasan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang sudah dianggarkan benar-benar dibelanjakan dengan semestinya. Proses pengawasan keuangan di MTS An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dimulai dengan penentuan standar pelaksanaan pengawasan. Pengawas keuangan melakukan identifikasi penyimpangan yang ada dan yang terakhir yaitu mencari solusi atas penyimpangan yang telah ditemukan. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan untuk membandingkan antara pelaksanaan dengan perencanaan, maka dari itu harus ada pembanding dan yang dibandingkan. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan yang dimaksud dengan pembanding adalah patokan untuk pengawas keuangan melakukan proses pengawasan keuangan. Patokan pengawasan yang digunakan oleh pengawas keuangan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo adalah RAPBM.⁴⁰

Setelah pengawas keuangan menentukan standar maka langkah selanjutnya pengawas keuangan baik pengawas internal maupun eksternal melakukan proses pengawasan. Proses pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan antara pelaksanaan perencanaan atau membandingkan laporan keuangan dengan RAPBM. Apabila menemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengawas keuangan harus menemukan solusi atau penyelesaian atas masalah tersebut. Kepala madrasah sebagai pengawas keuangan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah yang ada. Pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh kepala madrasah saja akan tetapi berdiskusi dengan ketua yayasan. Proses pengawasan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada dasarnya telah sesuai dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh Nanang Fattah yaitu proses pengawasan keuangan dimulai dengan penentuan standar. Standar pengawasan keuangan yang ditetapkan oleh

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad, SHI., MSI. Waka Kurikulum pada tanggal 04 Februari 2021 pukul 09.07 WIB.

pengawas keuangan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo yaitu RAPBM.⁴¹

Setiap lembaga publik terutama lembaga yang menggunakan dana publik seperti sekolah harus melakukan pertanggungjawaban keuangan begitu juga di MTs An-Nawawi yang melakukan pertanggungjawaban keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas suatu lembaga. Melalui laporan pertanggungjawaban pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bahwa MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo telah menggunakan uang madrasah secara bertanggung jawab dan sesuai rencana. Proses pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dimulai dengan penyusunan laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pemerintah yaitu kementerian agama dan juga Yayasan An-Nawawi.⁴²

Setiap bulan bendahara MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo membuat laporan keuangan yang ditunjukkan kepada kepala madrasah sehingga kepala madrasah mengetahui seberapa besar penerimaan yang didapatkan oleh Madrasah dalam satu bulan dan berapa besar pengeluaran yang dibelanjakan oleh Madrasah dalam satu bulan. Setiap 3 bulan sekali kepala madrasah dan bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dan BANSEK yang ditunjukkan kepada pemerintah, laporan ini dibuat untuk menyatakan bahwa dana BOS dan BANSEK yang diterima madrasah telah dipergunakan sesuai dengan prosedur penggunaannya. Sedangkan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk yayasan disusun setiap 1 tahun sekali yaitu setiap akhir tahun ajaran. Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah yang berisi laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana dan penggunaan dana secara keseluruhan selama satu tahun anggaran hal ini sesuai dengan pendapat mulyasa tentang pertanggungjawaban keuangan, di mana pertanggungjawaban keuangan menyangkut proses pertanggungjawaban penerimaan dana dan penggunaan dana sekolah.⁴³

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad, SHI., MSI. Waka Kurikulum pada tanggal 08 Februari 2021 pukul 09.05 WIB.

⁴² Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 09 Februari 2021 pukul 08.37 WIB.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq Fauzi, SHI. Kepala MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 09.11 WIB.

Kesimpulan

Implementasi manajemen pembiayaan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo yaitu perencanaan keuangan (budgeting) melalui proses penganggaran keuangan. Proses penganggaran keuangan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dimulai dengan mengadakan rapat pleno, mengidentifikasi sumber penerimaan Madrasah, mengidentifikasi pengeluaran Madrasah, penyusunan RAPBM, mengusulkan RAPBM, melakukan revisi RAPBM, hingga pada tahap pengesahan RAPBM. Pelaksanaan/pembukuan (akunting) yang digunakan MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dalam proses pencatatan keuangan adalah buku kas umum, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank dan laporan keuangan. Proses pengawasan keuangan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dimulai dengan menjadikan RAPBM sebagai standar pengawasan pelaksanaan pengawasan baik pihak internal dan pihak eksternal untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam laporan keuangan kemudian tahap penemuan solusi untuk penyimpangan yang telah ditemukan. Tahap penilaian (auditing) dilaksanakan MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo yaitu dimulai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pemerintah dan yayasan.

Daftar Pustaka

- Asfila, Murniati, dan Nasir Usman. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Mtsn Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah." *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah* 3, no. 4 (2015).
- Athoilah, Anton. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Bidayatun Ni'mah. *Skripsi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Semarang: IAIN Walisongo, 2009.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakrya, 2000.
- — —. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Inanna, Inanna. Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1, no. 1 (2018).
- Indy, Ryan, Fonny J. Waani, dan N. Kandowangko. "Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* 12, no. 4 (2019).

- J, Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Komariah, Nur. "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan." *Al-Afkar* 6, no. 1 (2018).
- Martin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Masditou. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu." *Ansiru PAI* 1, no. 2 (2017).
- Mirnati, Sri. *Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- — —. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010.
- Nurmalasari, Ita, dan Dewi Zainul Karimah. "Peran Manajemen SDM Dalam Lembaga" 2, no. 1 (2020).
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah. "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017).
- Sonedi, Sonedi, Zulfa Jamalie, dan Majeri Majeri. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat." *Fenomena* 9, no. 1 (2017).
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Usman, Jamiludin. "Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2016).
- UU RI NO 20. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia." *Zitteliana*, 2003.
- Wibowo, Adi. "Study Komparasi Penyelenggaraan Pendidikan SMK (Studi Kasus SMK Di Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah dan di SMK PGRI 2 Kediri)." *Jurnal At-Tarbiyat : Jurnal Pendidikan Islam*, no. 1 (2018).